



Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran (PKIPA)

Materi dapat diunduh di:
sites.google.com/view/saktiadm





Daftar Isi

1. Informasi Umum
2. Alur Proses
3. Ketentuan Proses Bisnis
4. Peran User SAKTI yang terlibat
5. Manual Aplikasi



Informasi Umum

01



Dasar **Hukum**



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 171/MK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI



Deskripsi



- Disebutkan pada Pasal 10A, bahwa untuk akuntabilitas penyelenggaraan kewenangan pengguna operasional modul, SAKTI menerapkan Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran (PKIPA)
- PKIPA terdiri dari
 1. PKIPA Awal
 2. PKIPA Periodik
 3. PKIPA Perubahan
 4. PKIPA Transaksi (sudah berjalan)
- PKIPA Awal, Periodik dan Perubahan merupakan Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran yang berupa dokumen yang ditandatangani masing – masing pejabat perbendaharaan dan diketahui oleh KPA
- PKIPA Transaksi merupakan pernyataan integritas yang diterapkan pada aplikasi SAKTI dengan cara disematkan menu *checklist* sebelum melakukan validasi yang menjadi kewenangan masing – masing pejabat perbendaharaan

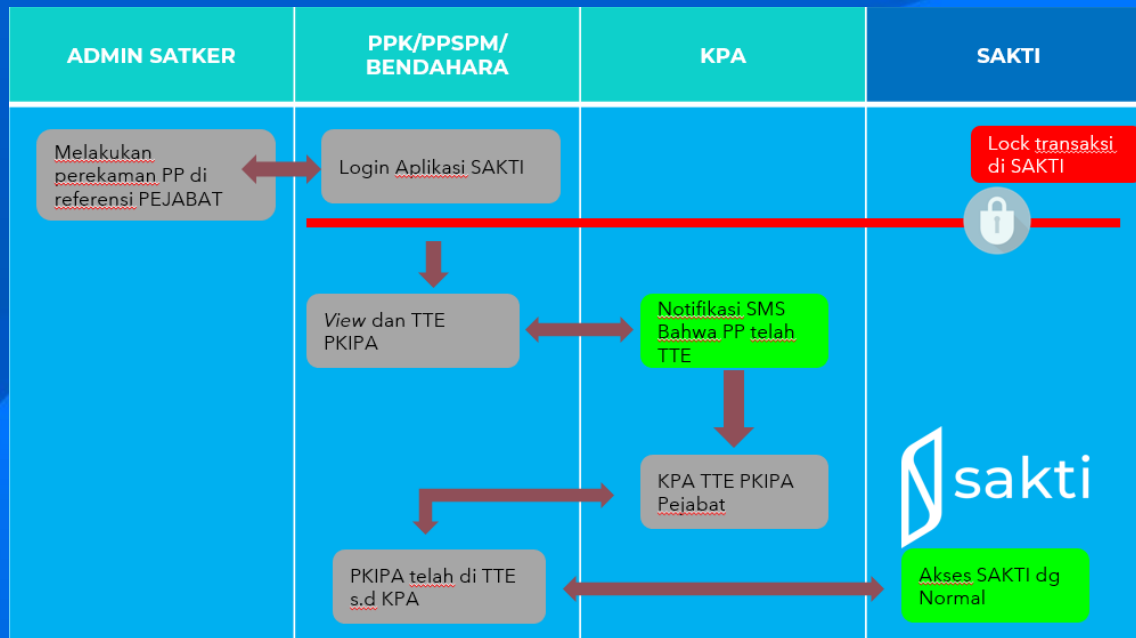


Alur Proses

02



Alur Proses PKIPA



Catatan:
PP = Pejabat Perbendaharaan



Ketentuan Proses Bisnis

03

Ketentuan Proses Bisnis PKIPA

- a. PKIPA merupakan dokumen yang wajib ditandatangani seluruh Pejabat Perbendaharaan Aktif di Tingkat Satuan Kerja secara periodik (semesteran)
- b. Masing – masing pejabat perbendaharaan yang belum menandatangani PKIPA s.d KPA, tidak dapat melakukan/ melanjutkan transaksi di Aplikasi SAKTI (*lock* transaksi).
- c. *Lock* Transaksi dilakukan pada menu di Aplikasi SAKTI sesuai dengan kewenangan masing – masing pejabat perbendaharaan
- d. PKIPA ditandatangani terlebih dahulu oleh Pejabat Perbendaharaan, kemudian dilanjutkan ditandatangani KPA
- e. PKIPA yang belum di ttd s.d KPA, masih dapat dilakukan penghapusan, dan sebaliknya PKIPA yang telah ditandatangani s.d KPA otomatis tersimpan dan tidak dapat dilakukan penghapusan.
- f. Penambahan dan Perubahan daftar nama Pejabat Perbendaharaan di menu PKIPA, dilakukan oleh Admin Satker di menu Tabel Pejabat.



Peran User SAKTI yang Terlibat

04

User SAKTI yang digunakan

ADMIN SATKER

- Melakukan perekaman, perubahan, dan penghapusan ketidaksesuaian daftar nama pejabat PKIPA

PPSPM, PPK, BENDAHARA

- Melakukan penandatangan PKIPA Pejabat Perbendaharaan

KPA

- Melakukan penandatangan PKIPA yang telah ditandatangani Pejabat Perbendaharaan
- Melakukan penandatangan PKIPA KPA

Admin KPPN

- Monitoring PKIPA Satker lingkup kerjanya



Manual Aplikasi

05



Tampilan Menu

Administrasi -> Admin -> Pernyataan Komitmen Integritas

Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran

Periode	Satuan Kerja	Nama Pejabat	Jabatan	Nama KPA	TTE Pejabat	TTE KPA	Aksi
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	Agung Firdaus	BEN	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	Hapus
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	KPA	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	Hapus
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	FARID NAUFAL AKBAR	PPK	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	Hapus
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	Iwan Dwi Kuswoyo	PPK	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	Hapus
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	SAIFIN NUHA	SPM	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	Hapus

« ‹ 1 › » 10 ▾

Refresh

Semua ▾

Tulis kriteria

Cari

Keluar

1. ADMIN SATKER

02. Penambahan/Perubahan Pejabat PKIPA

Tabel Pejabat

Nama	NIP	Tgl Lahir	Jabatan	KPPN	Status
Agung Firdaus	XXXXXXXXXXXX	20 Jan 2000	BENDAHARA	019	BARU
DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	XXXXXXXXXXXX	05 Jul 1996	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	019	AKTIF
FARID NAUFAL AKBAR	XXXXXXXXXXXX	10 Jan 1990	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	019	AKTIF
Iwan Dwi Kuswoyo	XXXXXXXXXXXX	19 Mar 1979	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	019	KIRIM
SAIFIN NUHA	XXXXXXXXXXXX	20 Jan 1998	PEJABAT SPM	019	AKTIF

Navigation: < > 10

Search: Semua

Buttons:

Penjelasan:

- Penambahan dan Perubahan Pejabat di Menu PKIPA, dilakukan di Tabel Pejabat
- Setelah ditambahkan, nama pejabat akan muncul otomatis di menu PKIPA

1. ADMIN SATKER

03. Penghapusan Pejabat PKIPA (1/2)

Tabel Pejabat

Nama	NIP	Tgl Lahir	Jabatan	KPPN	Status
Agung Firdaus	[REDACTED]	20 Jan 2000	BENDAHARA	019	BARU
DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	[REDACTED]	05 Jul 1996	KUJASA PENGGUNA ANGGARAN	019	AKTIF
FARID NAUFAL AKBAR	[REDACTED]	10 Jan 1990	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	019	AKTIF
Iwan Dwi Kuswoyo	[REDACTED]	19 Mar 1979	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	019	KIRIM
SAIFIN NUHA	[REDACTED]	20 Jan 1998	PEJABAT SPM	019	AKTIF

10

Semua Tulis kriteria Cari Refresh

Unduh Form Informasi Pejabat ADK

Rekam Simpan Ubah Batal Hapus Keluar

Konfirmasi Penghapusan

⚠ Apakah Anda yakin untuk menghapus ?

✓ Ya ✗ Tidak

Penjelasan:

- Penghapusan dilakukan di Tabel Pejabat

1. ADMIN SATKER

03. Penghapusan Pejabat PKIPA (2/2)

Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran

Periode	Satuan Kerja	Nama Pejabat	Jabatan	Nama KPA	TTE Pejabat	TTE KPA	Aksi
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	Agung Firdaus	BEN	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	Hapus
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	KPA	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	Hapus
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA IAKARTA VII	FARID NAUFAL AKBAR	PPK	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	Hapus
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	Iwan Dwi Kuswoyo	PPK	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	Hapus
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	SAIFIN NUHA	SPM	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	Hapus

Navigation: 10

Search:

Penjelasan:

- Klik tombol Hapus di Menu PKIPA



Hal yang Perlu Diperhatikan

Catatan

1. Apabila belum melakukan penghapusan pejabat di Tabel Pejabat dan melakukan Hapus Pejabat di PKIPA, maka Pejabat Tersebut akan muncul kembali (ter-generate ulang)
2. Apabila melakukan hapus pejabat PKIPA yang telah di TTE Pejabat, maka status TTE akan tereset dan perlu melakukan TTE Pejabat ulang
3. Tidak dapat dilakukan penghapusan apabila PKIPA telah ditandatangani s.d KPA

2. PPSPM/ PPK/ BENDAHARA

01. Login Menggunakan User Pejabat Perbendaharaan

🕒 Jumat, 5 Januari 2024 09:50:52 (Waktu Server)
🏢 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII

📖 🔔 🏠 FARID NAUFAL | 320634*****003
VALIDATOR SATKER 015115 2024

Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran

Periode	Satuan Kerja	Nama Pejabat	Jabatan	Nama KPA	TTE Pejabat	TTE KPA	Aksi
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	Agung Firdaus	BEN	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	KPA	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	FARID NAUFAL AKBAR	PPK	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	Lihat
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	Iwan Dwi Kuswoyo	PPK	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	SAIFIN NUHA	SPM	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	

⌂ ⏪ 1 ⏩ 10 ▾ Refresh

Semua ▾ Tulis kriteria Can

🏠 Keluar

Penjelasan:

- Pejabat Perbendaharaan hanya dapat melihat PKIPA yang bersangkutan

2. PPSPM/ PPK/ BENDAHARA

02. Dokumen PKIPA

The screenshot shows a document viewer interface with a toolbar at the top. The toolbar includes buttons for 'Kembali', 'Verifikasi Dokumen', 'Sign Dokumen', and 'Download'. Below the toolbar, there are navigation controls for zooming in/out, rotating, page width, and page navigation (Previous Page, Next Page). The document content is centered and reads:

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII
JL OTTO ISKANDARDINATA NO 53 LANTAI 3 JAKARTA, KOTA JAKARTA PUSAT 13220
Telepon : 02185915425 Faksimili : 02185915425

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Penjelasan:

1. Verifikasi Dokumen : untuk melihat status TTE Dokumen PKIPA
2. Sign Dokumen : untuk menandatangani Dokumen PKIPA
3. Download : untuk mengunduh Dokumen PKIPA

2. PPSPM/ PPK/ BENDAHARA

02. TTE PKIPA (1/2)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada semester I (satu) tahun 2024 :

1. Pelaksanaan anggaran akan dilakukan dengan menerapkan mekanisme check and balance melalui pemisahan kewenangan antar Pejabat Perbendaharaan guna terlaksananya pengujian secara materiil dan administratif sesuai tugas dan wewenang masing-masing terhadap bukti-bukti pengeluaran yang telah disahkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan
2. Pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Penggunaan sistem teknologi melalui aplikasi dan pendukung yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian oleh masing-masing pemegang kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk di dalamnya penggunaan OTP dan akses user SAKTI serta


Proses Setuju

Sertifikat	015115
Nama	FARID NAUFAL AKBAR
NIK	[REDACTED]
Input Passphrase	[REDACTED] <input type="button" value="Proses"/>


Dokumen ini memiliki tanda tangan digital **Terapkan**

KOTA JAKARTA PUSAT, 05 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Mengetahui,
Kuasa Pengguna



Ditandatangani secara elektronik
DWI RYAN BAGUS PANUNTUN
NIP/NRP. [REDACTED]



Ditandatangani secara elektronik
FARID NAUFAL AKBAR
NIP/NRP. [REDACTED]

Dokumen ini telah ditandatangani pada Sistem SAKTI menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian dokumen elektronik, silahkan kunjungi halaman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Penjelasan:

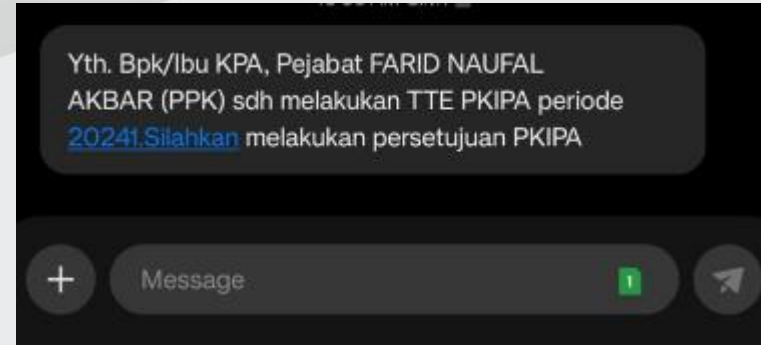
1. Input Passphrase -> Proses
2. Dokumen berhasil di TTE, muncul barcode, dan terdapat keterangan Dokumen ini memiliki tanda tangan digital

2. PPSPM/ PPK/ BENDAHARA

02. TTE PKIPA (2/2)

	TTE Pejabat	TTE KPA	Aksi
ANUNTUN	--	--	
ANUNTUN	--	--	
ANUNTUN	Sudah TTE	--	Lihat
ANUNTUN	--	--	
ANUNTUN	--	--	

[Refresh](#)



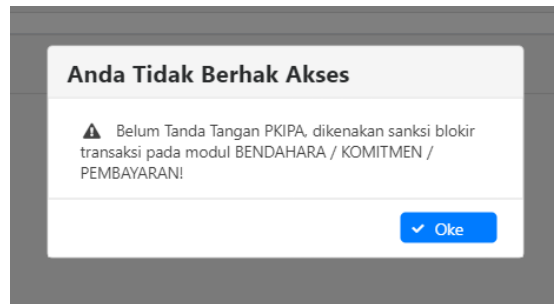
Penjelasan:

1. Ketika Kembali ke halaman PKIPA, maka kolom TTE Pejabat akan berubah **“Sudah TTE”**
2. KPA akan mendapatkan notifikasi SMS bahwa Pejabat Perbendaharaan Telah TTE PKIPA

Hal yang Perlu Diperhatikan

Catatan

1. Apabila dokumen PKIPA belum di TTE s.d KPA, maka akan dilakukan lock transaksi setiap menu sesuai kewenangan pada Aplikasi SAKTI di masing – masing pejabat perbendaharaan



2. Lock menu transaksi masing – masing pejabat perbendaharaan
 - a) PPK -> Blok Transaksi dilakukan pada saat akses menu pembayaran dan komitmen
 - b) PPSPM -> Blok Transaksi dilakukan pada saat akses menu pembayaran
 - c) Bendahara -> Blok transaksi dilakukan pada saat akses menu bendahara
3. *Barcode* bukan sebagai tanda dokumen telah ditandatangani pejabat secara elektronik, silahkan melakukan pengecekan di verifikasi dokumen

3. KPA

01. Login Menggunakan User KPA

Jumat, 5 Januari 2024 10:46:47 (Waktu Server)
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII

DWI RYAN | 330302*****0002
APPROVAL SATKER 015115_2024

Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran

TTE Sekaligus

Periode	Satuan Kerja	Nama Pejabat	Jabatan	Nama KPA	TTE Pejabat	TTE KPA	Aksi
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	Agung Firdaus	BEN	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	Sudah TTE	--	Lihat
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	KPA	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	Lihat
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	FARID NAUFAL AKBAR	PPK	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	Sudah TTE	--	Lihat
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	Iwan Dwi Kuswoyo	PPK	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	SAIFIN NUHA	SPM	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	

Refresh

Semua [Cari](#)

[Keluar](#)

Penjelasan:

1. Tombol Lihat, hanya akan muncul bagi Pejabat Perbendaharaan yang telah TTE
2. Terdapat 2 (dua) cara KPA menandatangani PKIPA
 - a) Satu per satu
 - b) TTE Sekaligus

3. KPA

02. TTE PKIPA (1/2)

Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran

TTE Sekaligus

Berkas	Satuan Kerja	Nama Pejabat	Jabatan
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	Agung Firdaus	BEN
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	KPA
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	FARID NAUFAL AKBAR	PPK
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	Iwan Dwi Kuswoyo	PPK
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	SAIFIN NUHA	SPM

Semua Tulis kriteria

Sukses

⚠ Apakah anda yakin untuk melakukan TTE kolektif atas PKIPA Pejabat Perbendaharaan?

1. FARID NAUFAL AKBAR (015115-PPK)
2. DWI RYAN BAGUS PANUNTUN (015115-KPA)

Data yang ditandatangani secara kolektif adalah PKIPA yang telah ditandatangani oleh masing-masing pejabat perbendaharaan

✓ Ya ✗ Tidak

Proses Setuju

Satker: 015115

Nama: DWI RYAN BAGUS PANUNTUN

NIK: ██████████

Input Passphrase:

Proses

Penjelasan:

1. KPA klik tombol TTE Sekaligus
2. Akan muncul *popup* daftar PKIPA Pejabat yang harus ditandatangani
3. Input *passphrase*

3. KPA

02. TTE PKIPA (2/2)

TTE Pejabat	TTE KPA	Aksi
Sudah TTE	Sudah TTE	Lihat
Sudah TTE	Sudah TTE	Lihat
Sudah TTE	Sudah TTE	Lihat
--	--	
--	--	

[Refresh](#)

Penjelasan:

1. Kolom TTE KPA akan berubah menjadi Sudah TTE untuk seluruh Pejabat yang ditandatangani
2. Pejabat Perbendaharaan dapat mengakses menu di SAKTI dengan normal kembali

3. Admin KPPN

01. Tampilan Menu PKIPA Admin KPPN

The screenshot shows the SAKTI Admin KPPN interface. The top navigation bar includes the user name 'DWI RYAN' and the role 'ADMIN KPPNBUN 527048 2024'. The left sidebar contains a menu with categories like 'Administrasi', 'Admin', 'Pernyataan Komitmen Integritas', and 'Report'. The main content area displays a table titled 'Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran' with columns for 'Periode', 'Satuan Kerja', 'Nama Pejabat', 'Jabatan', 'Nama KPA', 'TTE Pejabat', 'TTE KPA', and 'Aksi'. The table contains 20 rows of data. Below the table, there is a pagination control showing '1' of 20 items and a 'Refresh' button. At the bottom, there is a search bar with a dropdown set to 'Semua' and a 'Cari' button. A 'Keluar' button is located in the bottom right corner.

Periode	Satuan Kerja	Nama Pejabat	Jabatan	Nama KPA	TTE Pejabat	TTE KPA	Aksi
20241	579330 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	RYSSA CHASYATILLAH WAHYU KAMAS	KPA	RYSSA CHASYATILLAH WAHYU KAMAS	--	--	
20241	579330 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	ARIF SETYANTO	PPK	RYSSA CHASYATILLAH WAHYU KAMAS	--	--	
20241	579330 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	ASTRI AQUA ISTIQOMAH	PPK	RYSSA CHASYATILLAH WAHYU KAMAS	--	--	
20241	579330 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	MUHAMMAD YUSUF	PPK	RYSSA CHASYATILLAH WAHYU KAMAS	--	--	
20241	579330 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	SPM	RYSSA CHASYATILLAH WAHYU KAMAS	--	--	Lihat
20241	527031 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	SRI UTAMI	BEN	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	
20241	527031 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	KPA	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	Lihat
20241	527031 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	Ahmad Munir	PPK	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	
20241	527031 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	Amin Zuhri	PPK	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	
20241	527031 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	AQUS IMAN SANTOSO	SPM	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	
20241	527027 - KANWIL DITEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	Rosi Nurvitasari	BEN	Rina Robiati	--	--	
20241	527027 - KANWIL DITEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	Rina Robiati	KPA	Rina Robiati	--	--	
20241	527027 - KANWIL DITEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	ARINTO SUATMONO	PPK	Rina Robiati	--	--	
20241	527027 - KANWIL DITEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	Arif Setyanto	PPK	Rina Robiati	--	--	
20241	527027 - KANWIL DITEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	Basuki Rachmad	PPK	Rina Robiati	--	--	
20241	527027 - KANWIL DITEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	Evy Cahyani 1234	PPK	Rina Robiati	--	--	
20241	527027 - KANWIL DITEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	SUDIYANTO	SPM	Rina Robiati	--	--	
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	Agung Firdaus	BEN	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	KPA	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	Lihat
20241	015115 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	FARID NAUFAL AKBAR	PPK	DWI RYAN BAGUS PANUNTUN	--	--	

Penjelasan:

1. Kolom TTE KPA akan berubah menjadi Sudah TTE untuk seluruh Pejabat yang ditandatangani
2. Pejabat Perbendaharaan dapat mengakses menu di SAKTI dengan normal kembali



Hal yang Perlu Diperhatikan

Catatan

1. Apabila terdapat perubahan pejabat perbendaharaan di tengah periode, maka pejabat baru tetap harus menandatangani PKIPA dalam periode tersebut agar dapat mengakses SAKTI (PKIPA Perubahan)



Ingat!



**User dan password SAKTI menjadi
tanggung jawab pribadi.**



[INFO LINK]

Untuk Informasi lengkap
Form, Contoh Pengisian, Juknis Admin
Silakan kunjungi :

sites.google.com/view/saktiadm

Jika butuh info untuk mengetahui role saja:

bit.ly/rolesakti



Terima Kasih

**Direktorat Sistem Informasi dan
Teknologi Perbendaharaan**

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia